

# KEMISKINAN DAN REORIENTASI PEMIKIRAN EKONOMI

Iskandar

Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

## Abstract :

There were hundreds of programs nowadays that were carried out for weak and poor groups. Respectively the Department of the government had various programs for these weak and poor groups. However, according to Prof. Mubyarto's statement that was very rare today not the matter of the fund but the matter of the interest in the poor group. The standard measurement of the interest definitely not in the volume and the number of voices like in the General Election campaign, but his actualization. In this case, the social interest not only came from the government but also from all over the social stratum.

**Key Word : Kemiskinan, Reorientasi**

## 1. Pendahuluan

Secara historis, kemiskinan pada dasarnya bukan merupakan masalah baru. Berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan telah pula dilaksanakan. Meskipun demikian, setiap upaya mengangkat kembali masalah kemiskinan, merupakan langkah positif. Hal ini berarti bahwa secara sadar kita mewaspadai bahwa proses pembangunan masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Disamping itu, terlepas dari hasil-hasil yang telah dicapai dalam penanggulangannya, masalah kemiskinan yang diangkat kembali dalam perbincangan masyarakat umum, akademik ataupun upaya-upaya penanggulangan praktis akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian serius. Setidaknya kemiskinan memerlukan suatu strategi untuk upaya penanggulangannya.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kemiskinan, seperti motivasi, perilaku kelompok-kelompok miskin, sebab-sebab kemiskinan, hakekat dan proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, pendekatan dan metodenya. Misalnya, adakah ambisi, motivasi, kemampuan dan orientasi budaya pada kelompok-kelompok miskin? Kalau ada, apa beda hal itu dengan kelompok-kelompok yang relatif lebih mampu. Kalau ada, bagaimana cara membangkitkan motivasi itu? Seberapa jauh pandangan-pandangan yang didasarkan pada etika suatu etnis atau bangsa yang perlu ditelaah dan dikembangkan, sehingga inti budayanya dapat dipahami lebih mendalam.

Secara organisasional/kelembagaan, kemiskinan pada dasarnya bukan hanya tugas dan tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintah propinsi,

pemerintah pusat maupun seluruh organisasi masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa kelompok-kelompok miskin sukar memanfaatkan peluang dan kualitas sumberdayanya rendah. Secara ekonomis yang tampaknya mendapat konsensus adalah bahwa seseorang atau kelompok miskin karena *lack of economic resources* (ketiadaan sumber daya ekonomi). Tetapi, apakah dengan menyediakan sumber daya ekonomi, lalu kelompok itu akan lepas dari tindihan kemiskinan? Ini pun memerlukan spesifikasi pemahaman tentang tanggapan, sikap dan perilaku, tidak hanya dari pihak peneliti, perencana dan pelaksana program, tetapi juga pada kelompok-kelompok sasaran. Kemudian, kelompok-kelompok ini pun lazimnya mengalami kelangkaan aksesibilitas kepada sarana, prasarana dan pelayanan.

Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah gizi buruk (Soekirman : 2005). Data nasional dan di negara lain menunjukkan adanya hubungan antara kurang gizi dan kemiskinan. Proporsi anak yang gizi kurang dan gizi buruk berbanding terbalik dengan pendapatan. Makin kecil pendapatan penduduk, makin tinggi persentase anak yang kekurangan gizi; makin tinggi pendapatan, makin kecil persentasenya. Hubungannya bersifat timbal balik. Kurang gizi berpotensi sebagai penyebab kemiskinan melalui rendahnya pendidikan dan produktivitas. Sebaliknya, kemiskinan menyebabkan anak tidak

mendapat makanan bergizi yang cukup sehingga kurang gizi dan seterusnya.

Kemiskinan merupakan penghambat keluarga untuk memperoleh akses terhadap ketiga faktor penyebab di atas. Kemiskinan tidak memungkinkan anak balita mendapat ASI yang baik dan benar. Kemiskinan dan pendidikan rendah membuat anak tidak memperoleh pengasuhan yang baik sehingga anak tidak memperoleh ASI, misalnya. Kemiskinan juga menghambat anak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Apakah dengan demikian untuk mencegah gizi buruk harus menunggu berhasilnya pembangunan ekonomi sampai masalah kemiskinan dituntaskan ? Masalahnya berapa lama kita harus menunggu perbaikan ekonomi, dan membiarkan anak-anak mati akibat gizi buruk.

Kita tahu pembangunan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan memakan waktu lama. Pada masa Orde Baru diperlukan waktu lebih dari 20 tahun untuk mengurangi penduduk miskin dari 40 persen (1976) menjadi 11 persen (1996).

Data empiris dari dunia menunjukkan bahwa program perbaikan gizi dapat dilakukan tanpa harus menunggu rakyat menjadi makmur, tetapi menjadi bagian yang eksplisit dari program pembangunan untuk memakmurkan rakyat (Soekirman, Pidato Pengukuhan Guru Besar IPB, 1991).

Mengkaji uraian di atas maka sampailah kita pada permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini yaitu :

- (1) Sejauhmana peranan dan relevansi konsep-konsep ilmu ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan,
- (2) Perlukah reorientasi pemikiran ekonomi.

#### 1. Tujuan

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut maka tujuannya adalah agar diperoleh model-model alternatif pengelolaan, pendekatan, dan metode penanggulangan kemiskinan yang benar-benar dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### 2. Peranan Ilmu Ekonomi

Kemiskinan sebagai suatu fenomena ekonomi dan sosial secara teoritis pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yakni kemiskinan struktural, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul bukan karena sifatnya individual tetapi kemiskinan yang dialami sekelompok masyarakat; dan bukan pula karena satu sebab, tetapi berbagai sebab yang berbelit dan melilit kondisi kelompok penduduk (Soemardjan, 1979). Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang timbul akibat terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah, antar lapisan sosial, sedangkan kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang timbul akibat tingkat pendapatan yang tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (seperti ; pangan, papan, sandang, pendidikan dan kesehatan).

Menurut Nasikun (1995), kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan yaitu bahwa :

“Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifase, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”.

Pandangan ini mengisyaratkan, bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya berdiri sendiri, sehingga dalam penanggulangannya menuntut pemahaman, kecermatan dan kehati-hatian. Di dalam diri masyarakat miskin tidak hanya terdapat kelemahan (kondisi serba kekurangan), tetapi dalam diri mereka juga terdapat potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus mampu

mengakomodasikan kedua aspek tersebut. Menurut Koenraad Verhagen, (1996), lebih-lebihkan kemiskinan, kita cenderung melupakan apa yang mereka miliki. Orang-orang miskin bukanlah orang-orang yang “tidak memiliki” (*havenot*). Dari sudut pandang ekonomi mereka adalah orang-orang yang memiliki sedikit” (*have-little*) di sisi lain orang-orang miskin memiliki kekayaan budaya dan sosial.

Kemiskinan struktural yang parah, dan belum teratasi hingga saat ini merupakan kenyataan ekonomi yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Selain itu kemiskinan dan pengangguran pada dasarnya bukan merupakan kesalahan dan dosa si miskin semata. Tetapi mereka telah menjadi korban sistem ekonomi kapitalistik-liberal yang menempatkan pemilik modal atau kapitalis selalu sebagai pencipta lapangan kerja dan pemberi pekerjaan, sedangkan orang-orang miskin selalu berkedudukan sebagai “peminta” atau “pengemis” pekerjaan. Selain itu sampai saat ini masih ada orang yang berpendapat bahwa kemiskinan itu lahir karena kemalasan. Walaupun sekiranya pendapat ini ada benarnya, seharusnya jangan membenarkannya terus-menerus, tetapi mencoba untuk mencari persoalan berikutnya: "Mengapa mereka malas?"

### 3. Budaya Kemiskinan

Kemiskinan dalam konteks budaya pada dasarnya berkaitan dengan keterbatasan

pemilikan dan penguasaan sumber-sumber dasar material serta merefleksikan suatu cara hidup tertentu atau kebiasaan/budaya tertentu, yang ciri-cirinya antara lain ; fatalistik, meminta-minta, selalu mengharapkan bantuan, serta cenderung suka berjudi dll. (terutama untuk masyarakat miskin kota). Jaringan-jaringan dan organisasi-organisasi sosial yang terbentuk pada masyarakat miskin tersebut nampaknya kurang mendorong pada peningkatan status ekonomi mereka, tetapi justru menjerat mereka untuk tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Dengan kata lain, budaya kemiskinan dan institusi sosial yang muncul dari kemiskinan cenderung akan memperkuat dan memapankan kemiskinan itu sendiri, bukannya menemukan jalan dan atau ruang bagi para pendukungnya untuk bisa naik status sosial-ekonominya.

Dengan demikian, kemiskinan terkait langsung dengan pengalaman seseorang, di pedesaan maupun di perkotaan atau di mana pun. Selain itu kemiskinan berkaitan pula dengan seseorang yang mengalami kelangkaan, keterbatasan, dan kekurangan dalam pemilihan dan penguasaan atas benda. Dengan kata lain tidak adanya akses dan kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi atau kapital lainnya, sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk bisa melakukan mobilitas secara vertikal.

Oleh karena itu, tanpa mengurangi arti pentingnya pembangunan yang telah dilakukan, maka kondisi kemiskinan yang terjadi selama ini mengindikasikan berbagai

model yang dibangun dan konsep program yang dilaksanakan belum mampu *membentuk* sosial ekonomi masyarakat yang tangguh.

#### 4. Reorientasi Pemikiran Ekonomi

Beberapa koreksi dari para pakar menunjukkan, bahwa salah satu permasalahan yang mendasar dalam hal ini adalah orientasi pembangunan ekonomi yang kurang berpihak pada golongan berpenghasilan rendah atau ekonomi lemah. Kondisi ini tercermin dari konsentrasi industrialisasi berskala menengah ke atas, sehingga sektor usaha kecil (ekonomi lemah) yang dijalankan oleh sebagian besar masyarakat kurang *diperhitungkan*. Menurut catatan Halwani (1999), sebagian besar (98,2%) adalah unit usaha kecil dan industri rumah tangga dengan tenaga kerja sebanyak 3.484.408 orang (63,3%). Industri yang tergolong dalam usaha berskala besar dan sedang (0,8%) dengan tenaga yang terserap sebanyak 1.691.435. (32,7%). Namun jika hasil *nilai tambah* dari dua jenis kegiatan tersebut diperbandingkan, maka hasil yang diperoleh dari sektor industri kecil masih jauh dari yang harapan yakni sebesar 17,8% (Rp.2,03 trilyun), sedangkan industri berskala besar (0,8%) telah memberikan nilai tambah Rp.9,35 trilyun (82,2%).

Bila mengkaji model dan kerangka konseptual penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan di atas nampak bahwa solusi masalah kemiskinan masih berdasar pada kerangka berpikir ekonomi neoklasikal yang

menganut mekanisme persaingan pasar-bebas. Kerangka berpikir ekonomi neoklasikal ini ternyata terbukti secara empirik tidak mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural untuk terlaksananya transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang bermakna. Ekonomi neoklasikal berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) ekonomi dan yang melahirkan eksploitasi serta proses pemiskinan (*impoverishment*) sosial-ekonomi. Selain itu meninggalkan kepedulian akan harkat manusia dalam lingkup moralitas ekonomi.

Ilmu Ekonomi yang diajarkan dan diterapkan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II yang dirintis awal oleh buku *Economics An Introductory Analysis* (Paul Samuelson dari MIT, 1946, sekarang tahun 2001 edisi ke-17) dikenal sebagai teori ekonomi Neoklasik. Isi ajaran ekonomi Neoklasik merupakan sintesa teori ekonomi pasar persaingan bebas Klasik (Homo ekonomikus dan *invisible hand* Adam Smith), dan ajaran *marginal utility* serta keseimbangan umum Neoklasik. Tekanan ajaran ekonomi Neoklasik adalah bahwa mekanisme pasar persaingan bebas, dengan asumsi-asumsi tertentu, selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang. Artinya jika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekalipun, masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan bersama yang optimal (*Pareto Optimal*)

Gunnar Myrdal (1967) menyatakan sejak awal bahwa teori ekonomi Neoklasik tidak dikembangkan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi negara-negara terbelakang (*under developed regions*). Negara-negara terbelakang atau berkembang tersebut harus dikembangkan teori lain oleh para ekonom muda dari negara-negara sedang berkembang sendiri (Swasono,2003). J.H.Boeke, ekonom Belanda, menyatakan hal yang sama jauh sebelumnya dalam disertasinya tahun 1910, dan diperkuatnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ekonomi kolonial tropik tahun 1930 di Universitas Leiden. Pada tahun 1979 dalam pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada, Mubyarto secara eksplisit menyatakan bahwa teori ekonomi Neoklasik bermanfaat untuk menumbuhkan perekonomian tetapi tidak menolong untuk mengadakan pemerataan dan mewujudkan keadilan.

Ilmu ekonomi yang dipelajari selama ini, masih bersifat menyeluruh (tidak parsialistik neoklasikal) di kampus-kampus, dan tidak terkoreksi sama sekali oleh kenyataan-kenyataan mengenai parsialitasnya. Selain itu, masih mengambil asumsi dasar yang kelewat simplistik (Thurow dalam Swasono;2003), bahwa manusia rasional adalah manusia yang mengejar utilitas ekonomi optimal, yaitu *maximum gain* dan *minimum sacrifice*, tetapi juga pada dasarnya hanya bersandar pada

mekanisme pasar, inisiatif individu dan persaingan.

Buku Amitai Etzioni, *The Moral Dimension: Toward a New Economics* (1988), menggambarkan secara tepat pergulatan paradigmatis antara ajaran ekonomi baru (sosioekonomi) dengan ajaran ekonomi Neoklasik yang individualistik-rasionalistik. Kondisi saat ini pada dasarnya berada di tengah-tengah pertarungan paradigma. Paradigma neoklasik yang individualistik-rasional, dan diterima serta diterapkan tidak hanya pada kehidupan ekonomi, tetapi juga pada hubungan-hubungan sosial yang semakin luas, dari kejahatan sampai kehidupan keluarga (Etzioni 1998: ix).

Perkembangan ilmu ekonomi yang makin meninggalkan etika dimulai oleh David Ricardo (1817) yang mengenalkan ilmu ekonomi “*a priori*” yang abstrak, dan mengajarkan ilmu ekonomi yang seakan-akan tidak ada hubungannya dengan manusia (*depersonalized*). Manusia diubah menjadi “*model*” abstrak *homo-economicus*. Model “*homo-economicus*” yang menonjolkan *self-interest* atau “keserakahan manusia atas alam benda”, bertentangan dengan ajaran berbagai agama, karena dalam agama selalu diajarkan rezeki yang berlimpah yang diberikan Allah kepada manusia (Wilson 1997: 27 dalam Swasono,2003).

Dalam agama Islam menurut Swasono (2003) ditemukan banyak sekali petunjuk tentang sistem ekonomi yang tidak mengenal serba

kelangkaan (*scarcity*), karena rezeki diberikan serba cukup kepada manusia yang diciptakan-Nya.

1. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas (An Nuur: 38).
2. Allah-lah yang menciptakan kamu kemudian memberimu rezeki (Ar Rum: 40).

Dengan demikian jelas kiranya telah terjadi banyak penyimpangan ajaran ilmu ekonomi dari agama dan etika. Banyak praktek-praktek kebijakan ekonomi masyarakat dan pemerintah yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama.

Oleh karena itu nampaknya perlu dilakukan reorientasi pemikiran ekonomi. Dalam ilmu ekonomi pada dasarnya tidak boleh terbebas dari “pemihakan”. Ilmu ekonomi berorientasi pemihakan pada rakyat, karena rakyat yang memiliki negara. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) ekonomi merupakan lengah misi, karena yang dibangun dalam hal ini adalah rakyat, bangsa dan negara, bukan ekonominya atau pertumbuhannya. Dengan kata lain bahwa pembangunan bukan mengabdikan pada ilmunya/teorinya, ekonominya, atau pertumbuhannya, tetapi pembangunan harus mengabdikan pada rakyat, bangsa dan negara. Ilmu harus dapat ditawarkan dengan misi ilmu yang dikuasai, dikembangkan dan diabdikan kepada rakyat dan kepentingannya (Swasono:149:1999).

Reorientasi pemikiran ekonomi lainnya, seperti ; konsep pasar bebas, bahwa pasar bebas merupakan pasarnya pemilik modal dan pasarnya penguasa. Penentu harga di pasar misalnya, bukan lagi konsumen, tetapi *fund manager*. Lebih dari itu, pasar bebas tidak memberikan emansipasi ekonomi terhadap yang miskin, si miskin yang tidak memiliki kolateral/jaminan, ditampik oleh pasar dana, tidak dipercaya untuk memperoleh alokasi kredit (betapapun ia pemilik republik ini). Pasar bebas jelas menutup hak demokrasi ekonomi rakyat, yang miskin tanpa daya beli akan hanya menjadi penonton di luar pagar transaksi ekonomi (Swasono:80:1999). Jadi yang berdaulat adalah pasar, bukan rakyat. Inilah salah satu penyelewengan (bias orientasi ekonomi) dari pemihakan.

Dengan demikian pembangunan perekonomian rakyat merupakan suatu dasar pemihakan, strategi dan arah kebijaksanaan pemberdayaan ekonomi nasional. Kebijakan pemberdayaan ekonomi menjadi penentu bagi lahirnya kemandirian, kemakmuran dan emansipasi rakyat (Swasono:4:2001). Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kendala yang dis-orientatif sosial-budaya, politik dan ekonomi. Bahkan terjadi berkelanjutan adalah proses pelumpuhan/*disempowerment* (“pemiskinan”) terhadap rakyat, yang berdampak pada semakin meningkatnya ketergantungan rakyat.

Pemihakan kepada rakyat khususnya yang miskin, yang terpinggirkan merupakan keharusan untuk dapat melepaskan mereka yang terpuruk ini sebagai korban dari ketimpangan struktural. Keterpurukan ekonomi Indonesia selama ini, hendaknya dapat menyadarkan bahwa kita semua perlu melakukan re-orientasi pemikiran ekonomi. Bila diamati bahwa kondisi ekonomi saat ini seperti ; bank dan sistem perbankan yang terpuruk, industri besar yang belum bangkit, bantuan IMF telah dihentikan, tetapi ekonomi Indonesia tetap bekerja dan bahkan tumbuh  $\pm 4$  persen. Ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian nasional tersimpan suatu “energi” nasional berupa dana dan daya yang setiap saat mampu membangkitkan diri kita dari keterpurukan. Energi tersebut adalah ekonomi rakyat yang saat ini masih bekerja. Bahkan ekonomi rakyat yang mampu memberikan kehidupan murah bagi rakyat kecil/miskin/para buruh yang upahnya rendah.

##### 5. Pemberdayaan dan Paradigma Kemiskinan

Dalam konteks kemiskinan, pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin dalam hal ini merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan “penguatan” agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang

dimiliki. Uraian ini mengisyaratkan, bahwa langkah awal dalam penanganan masalah kemiskinan (keluarga miskin) perlu diidentifikasi potensi yang mereka miliki. Permasalahannya adalah bagaimana karakteristik potensi yang dimiliki oleh penduduk miskin. Identifikasi karakteristik potensi penduduk miskin dipandang penting karena solusi penanggulangan kemiskinan akan merujuk pada informasi/data tersebut. Selain itu, informasi/data yang dipublikasikan sering bias dengan kondisi riil di lapangan dalam menjelaskan fenomena kemiskinan yang sebenarnya. Hal ini terjadi sebagai akibat beragamnya indikator/instrumen pendataan yang digunakan, seperti ; indikator menurut BPS, BKKBN, Bappenas, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga studi lainnya.

Bila dicermati, baik paradigma modernisasi yang dipakai Bank Dunia maupun pembangunan populis yang digunakan UNDP masih menyimpan kelemahan. Keduanya masih melihat kemiskinan sebagai kemiskinan individu dan kurang memperhatikan kemiskinan struktural. Sistem pengukuran dan indikator yang digunakannya terfokus pada “kondisi” atau “keadaan” kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. Orang miskin hanya dipandang sebagai “orang yang serba tidak memiliki”: tidak memiliki pendapatan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dsb.

Kedua perspektif (Bank Dunia dan UNDP) tersebut masih belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan



dinamika kemiskinan. Metodanya masih berpijak pada *outcome indicators*. Sehingga kurang memperhatikan aspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya. Penduduk miskin dilihat hanya sebagai “korban pasif” dan objek penelitian. Bukan sebagai “manusia” (*human being*) yang memiliki “sesuatu” yang dapat digunakannya baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri.

Kelemahan pendekatan di atas pada dasarnya menuntut perubahan (paradigma baru) pada fokus pengkajian kemiskinan, khususnya menyangkut kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan. Paradigma baru tidak lagi melihat orang miskin sebagai orang yang serba tidak memiliki. Melainkan orang yang memiliki potensi (sekecil apapun potensi itu), yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinannya. Paradigma baru menekankan pada “apa yang dimiliki orang miskin” dari pada “apa yang tidak dimiliki orang miskin”. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah (*coping strategies*) yang telah dijalankannya secara lokal.

Paradigma baru studi kemiskinan sedikitnya mengusulkan empat poin yang perlu dipertimbangkan:

1. Kemiskinan sebaiknya dilihat tidak hanya dari karakteristik si miskin secara statis. Melainkan dilihat secara dinamis yang

menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya.

2. Indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga.
3. Konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (*income*) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.
4. pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa *key indicators* yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola aset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan.

Dengan demikian secara substansial setidak-tidaknya dalam konteks penanggulangan kemiskinan, penduduk miskin tidak hanya didekati sebagai *objek* (*gejala* yang diamati), tetapi harus dipandang sebagai subjek atau pelaku yang dikelompokkan dalam golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan

sumber daya, mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, dalam kerangka memahami potensi penduduk miskin, paling tidak terdapat tiga bentuk potensi yang diamati, yakni:

1. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar,

Tinjauan tentang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan akan dilihat dari aspek (1) pengeluaran keluarga, (2) *human capital* atau kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan (3) *security capital* atau kemampuan menjangkau perlindungan dasar.

2. Kemampuan dalam pelaksanaan peran sosial

Tinjauan tentang kemampuan peran sosial akan dilihat dari (1) kegiatan utama dalam mencari nafkah, (2) peran dalam bidang pendidikan, (3) Peran dalam bidang perlindungan, dan (4) peran dalam bidang kemasyarakatan.

3. Kemampuan dalam menghadapi permasalahan.

Tinjauan tentang kemampuan dalam menghadapi permasalahan, akan dilihat dari upaya yang mereka lakukan untuk mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi

Dengan kata lain profil kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik ekonominya seperti sumber pendapatan, pola konsumsi/pengeluaran, tingkat beban

tanggung dan lain lain. Juga perlu diperhatikan profil kemiskinan dari karakteristik sosial-budaya dan karakteristik demografinya seperti tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga, cara memperoleh air bersih dan sebagainya.

Demikian pula mengenai penyebaran kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik geografisnya, yaitu dengan menentukan di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dalam hal ini aspek geografis dapat di lihat dari penyebaran di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan/pedalaman.

Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik potensi penduduk miskin tersebut, selanjutnya dapat dibuat strategi pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah mendayagunakan potensi-potensi ekonomi masyarakat lokal dengan cara membangun pasaran untuk hasil usaha penduduk miskin tersebut. Harapannya adalah terjadinya "nilai tambah ekonomi" di wilayah setempat. Dengan demikian daya-beli masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya akan menjadi "energi" masyarakat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya. Kebijakan pemberdayaan pada dasarnya menjadi penentu bagi lahirnya kemandirian dan produktivitas masyarakat.

Khusus implementasi kebijakan gerakan pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat di kabupaten Kutai Kartanegara (Gerbang Dayaku) pada dasarnya adalah pengembangan dan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan misinya, yaitu pemberdayaan pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) serta penegakan supremasi hukum dan pemberdayaan seluruh komponen ekonomi, untuk menuju pada kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.

Gerakan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999 tersebut, tentu belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ; kelancaran penyaluran dana perimbangan yang tidak konsisten, adanya berbagai perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemahaman dan kesiapan masyarakat yang belum optimal. Namun nampaknya faktor penting yang menjadi penyebab adalah kualitas pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat selama ini bahwa gerbang-dayaku baru sebatas pemberian bantuan khusus untuk masyarakat kurang mampu (miskin) dari pemerintah kabupaten. Padahal pemberian bantuan sejumlah dana, sebenarnya diarahkan untuk memotivasi masyarakat agar mampu hidup mandiri. Dengan kata lain, bahwa hakikat dari program gerbang-dayaku pada dasarnya adalah kemandirian. Dengan demikian isu pokok yang harus disosialisasikan kepada masyarakat luas adalah konsep kemandirian. Dengan demikian isu pokok yang harus

disosialisasikan kepada masyarakat luas adalah konsep kemandirian.

Oleh karena itu belajar dari pengalaman selama ini, maka berbagai pembenahan terhadap konsep program gerbang-dayaku telah dilakukan. Paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan di kabupaten Kutai Kartanegara melalui pelaksanaan gerbang-dayaku yang dijalankan dengan prinsip-prinsip :

1. Berpangkal dan bermuara pada kepentingan serta keberpihakan pada masyarakat luas.
2. Bersifat pelayanan publik
3. Bertujuan meningkatkan etos kerja masyarakat
4. Partisipatif dan transparan

Tiga sektor unggulan yang menjadi arah pembangunan dalam hal ini adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Pengembangan pertanian, dan
3. Pengembangan industri pariwisata.

Harapannya adalah pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari tiga sektor unggulan tersebut. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*).

## 5. Kesimpulan dan Saran

1. Bahwa masalah kemiskinan pada dasarnya bukan semata-mata soal dana tetapi soal kepedulian sosial terhadap kelompok miskin. Bukan pula hanya kepedulian dari pemerintah, tetapi yang lebih penting adalah kepedulian seluruh masyarakat setempat di mana kelompok atau warga miskin berada. Tolok ukur kepedulian tentunya bukan dalam volume dan jumlah suara seperti dalam kampanye Pemilu, tetapi aktualisasinya.
2. Perlunya dilakukan reorientasi pemikiran ekonomi agar peranan ilmu ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan benar-benar menjadi rujukan yang tepat.
3. Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat merupakan sebuah solusi yang mendasar bagi penanggulangan kemiskinan.
4. Implementasi kebijakan gerakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Kutai Kartanegara (Gerbang Dayaku) selama ini pada dasarnya merupakan sebuah solusi, sekalipun masih belum optimal. Oleh karena itu agar program tersebut bermanfaat optimal di masa mendatang, maka diperlukan pembenahan pada tataran konsep maupun proses implementasinya.

## Daftar Pustaka

- Etzioni, Amitai, 1988, *The Moral Dimension : Toward A New Economics*, New York, The Free Press.
- Gunawan Sumodiningrat (1997), *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Pariwara, Jakarta. Cet.2
- Halwani, R.H., 1998. Paradigma Baru: Dapatkah Ekonomi Rakyat Memainkan Peran Sentral. Dalam *Sintesis*, Jurnal dua Bulanan Center For Inormation and Development Studies (CIDES) No.26 tahun ke 5 Jakarta.
- Keynes, John Maynard, 1936, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, London, Macmillan & Co
- Lester C. Thurow, 1983. *The Dangerous Currents: The State of Economics* (New York: Random House, 1983), Bab 1 dan Bab 8.
- Mubyarto, 2004. Pendidikan Ekonomi Kita, artikel 6 Januari 2004 Pusat Studi Ekonomi Pancasila - Universitas Gadjah Mada website: <http://www.ekonomipancasila.org> e-mail: [info@ekonomipancasila.org](mailto:info@ekonomipancasila.org) dan [pustepugm@indo.net.id](mailto:pustepugm@indo.net.id) web-master: [webmaster@ekonomipancasila.org](mailto:webmaster@ekonomipancasila.org)
- Mubyarto, 2003. Tantangan Ilmu Ekonomi Dalam Menanggulangi Kemiskinan, Artikel - Ekonomi Rakyat dan Pendidikan Ilmu Ekonomi - Maret 2003, Copyright © 2003 [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)
- Nasikun, 1995, *Kemiskinan di Indonesia Menurun*, dalam *Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya*, (Bagong Suyanto, ed), Airlangga Univercity Press.
- Nurimansjah Hasibuan. *Kemiskinan Struktural Di Indonesia: Menembus Ke Lapisan Bawah*
- Stone, E. (1992). Investing in the poor. *Asian Business*, April, hal. 24-32.
- Soekirman.2005. Kemiskinan dan gizi buruk, *Harian KOMPAS*. <http://www.kompas.com>.
- Swasono, Sri-Edi. 2003. Kompetensi Dan Integritas Sarjana Ekonomi, Artikel-Th.I-No.12–Februari, [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org) e-mail: [redaksi @ ekonomirakyat.org](mailto:redaksi@ekonomirakyat.org)

- Verhagen, K. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, cet2, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Wilson, Rodney, 1997, Economics, Ethics and Religion, London, MacMillan Press Ltd
- Yunus, Muhammad, 1993, *Alleviation of Poverty is a Matter of Will, not of Means*, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.